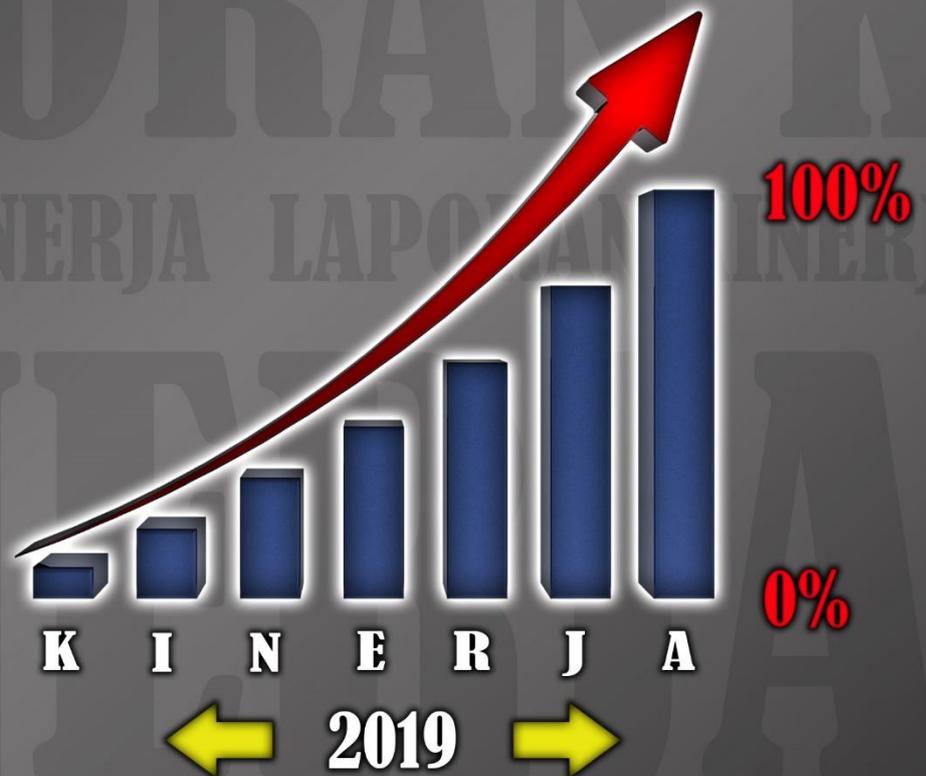




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ahmad Yani Telp. (0561) 736541 Fax. (0561) 730062
PONTIANAK - 78124

**LAPORAN
KINERJA
2019**



**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DAN PENGADAAN BARANG/JASA**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunianya Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2019 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Dalam laporan kinerja ini dijelaskan secara ringkas dan lengkap mengenai capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa sebagai pertanggungjawaban tahunan atas keberhasilan dan kegagalan dalam mengemban tugas dibidang pengendalian administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa. Kami menyadari masih terdapat kekeurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mengharapkan masukan dan perbaikan terhadap laporan kinerja ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, Januari 2020

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DAN PENGADAAN BARANG/JASA,

Drs. RAMINUDDIN, M.Si

Pembina

NIP. 19770830 199603 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja	16
B. Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	34
Lampiran	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada Bab II pasal 2 huruf a disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.

Menindaklanjuti Peraturan Daerah diatas, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Mengacu pada pada pasal 5 angka (1) Peraturan Gubernur tersebut diatas, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

- a. Keasistenan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sebagai koordinator :
 - 1) Biro Pemerintahan;
 - 2) Biro Hukum;
 - 3) Biro Kesejahteraan Rakyat.
- b. Keasistenan Perekonomian dan Pembangunan, sebagai koordinator :
 - 1) Biro Perekonomian;
 - 2) Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 3) Biro Pengelolaan Aset;
- c. Keasistenan Administrasi dan Umum, sebagai koordinator :



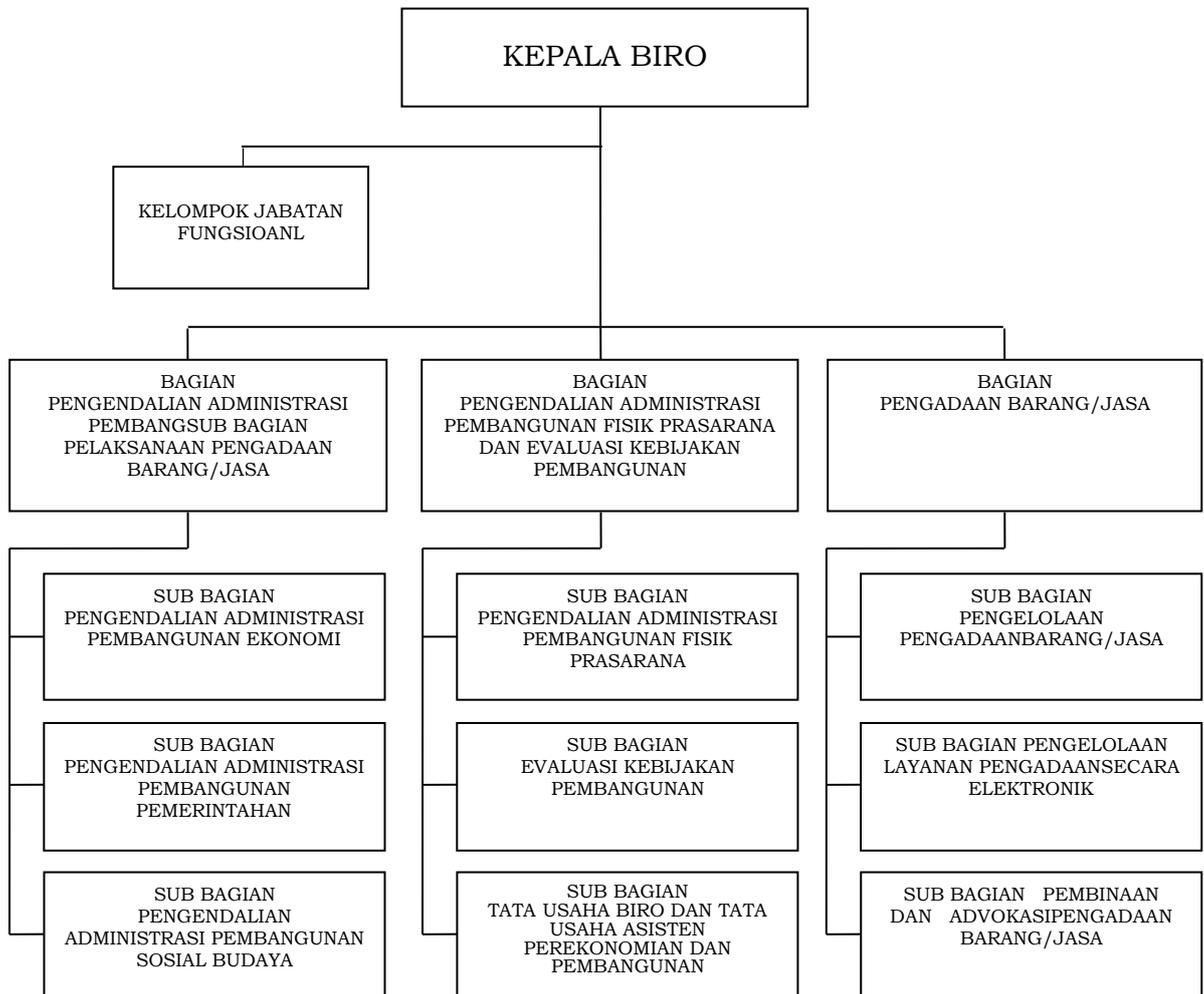
- 1) Biro Organisasi;
- 2) Biro Umum;
- 3) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;

2. Susunan Organisasi

Susunan/Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa yang terdapat dalam lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
Setda Provinsi Kalimantan Barat



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pada pasal 142 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 tersebut diatas dijelaskan bahwa Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai **tugas** merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah pada bidang pengendalian administrasi pembangunan ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, fisik prasarana dan evaluasi kebijakan pembangunan serta pengadaan barang/jasa.



Selanjutnya pada pasal 143 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai **fungsi** :

- a. Perumusan program kerja pada bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
- b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah pada bidang pengendalian administrasi pembangunan ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, fisik prasarana dan evaluasi kebijakan pembangunan serta pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi pada bidang pengendalian administrasi pembangunan ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, fisik prasarana dan evaluasi kebijakan pembangunan serta pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi pada bidang pengendalian administrasi pembangunan ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, fisik prasarana dan evaluasi kebijakan pembangunan serta pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang pengendalian administrasi pembangunan ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, fisik prasarana dan evaluasi kebijakan pembangunan serta pengadaan barang/jasa pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang pengendalian administrasi pembangunan ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, fisik prasarana dan evaluasi kebijakan pembangunan



serta pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Pelaksanaan tugas lainnya pada bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa tidak terlepas dari sumber daya aparatur, baik ditingkat struktural maupun fungsional. Berdasarkan data per 31 Desember 2019, Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa didukung oleh 45 Pegawai Negeri Sipil. Adapun komposisi Sumber Daya Manusia tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1

Data Pegawai menurut Analisis Beban Kerja (ABK) Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SDM APARATUR (ABK)	ASN TAHUN 2019
1	2	3
Kepala Biro APPBJ	1	1
A. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial Budaya	1	1
a. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi	1	1
1) Fungsional		
a. Analisis Kebijakan		
Utama	1	0
Madya	1	0
Muda	1	0
Pertama	3	0
2) Fungsional Umum		
a. Analisis Pembangunan	n/a	1
b. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Pemerintahan	1	1
1) Fungsional		
a. Analisis Kebijakan		
Utama	1	0
Madya	1	0
Muda	1	0
Pertama	3	0
2) Fungsional Umum		
a. Analisis Pembangunan	n/a	2



1	2	3
c. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Sosial Budaya	1	1
1) Fungsional		
a. Analis Kebijakan		
Utama	1	0
Madya	1	0
Muda	1	0
Pertama	3	0
2) Fungsional Umum		
a. Analis Pembangunan	n/a	1
b. Pengelola Keuangan	1	1
B. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik Prasarana dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	1	1
a. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik Prasarana	1	1
1) Fungsional		
a. Analis Kebijakan		
Utama	1	0
Madya	1	0
Muda	1	0
Pertama	3	0
2) Fungsional Umum		
a. Analis Pembangunan	n/a	2
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro dan Tata Usaha Asisten Perencanaan dan Pembangunan	1	1
1) Fungsional		
a. Analis Kepegawaian		
Utama	n/a	0
Madya	n/a	0
Muda	1	0
Pertama	n/a	0
b. Arsiparis		0
Terampil	1	0
Mahir	2	0
Pertama	1	0
2) Fungsional Umum		
a. Pengadministrasi Umum	1	2
b. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	0
c. Bendahara	1	1
d. Pengelola BMN	1	1
e. Pengelola Keuangan	1	0
f. Pengadministrasi Persuratan	n/a	2
c. Kepala Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Pembangunan	1	1
1) Fungsional		
a. Analis Kebijakan		
Utama	n/a	0
Madya	1	0
Muda	1	0
Pertama	2	0
2) Fungsional Umum		
a. Analis Pembangunan	n/a	2
C. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1	1
a. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	1	1
1) Fungsional		
a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		
Madya	n/a	0
Muda	2	3
Pertama	29	6
2) Fungsional Umum		
a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	n/a	7
b. Kepala Sub Bagian LPSE	1	0
1) Fungsional		
a. Pranata Komputer		
Madya	1	0
Muda	2	0
Pertama	3	0
b. Pranata Komputer		



1	2	3
Mahir	1	0
Terampil	4	0
Pemula	2	0
c. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi	1	1
1) Fungsional Umum		
a. Penyusun Bahan Proses Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan	2	2
b. Analis Permasalahan Hukum	1	0
TOTAL	99	45

Berdasarkan data di atas, Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa hanya memiliki 45 orang pegawai negeri sipil, dimana kondisi tersebut jauh dari kebutuhan ideal yaitu sekitar 99 orang dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

5. Sumber Daya Keuangan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2019, anggaran yang tersedia pada DPA guna mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 4.799.334.800 dan mengalami penambahan pada DPPA menjadi Rp. 4.834.408.882,00,-. Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat pada BAB III mengenai Akuntabilitas Kinerja.

6. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya aparatur dan sumber daya keuangan, faktor penunjang pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan adalah sarana dan prasarana. Adapun informasi mengenai aset tersebut adalah sebagai berikut :



Tabel 1.2

Rekapitulasi Buku Inventaris Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan
Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

NO	GOL	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	BARANG	JUMLAH HARGA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	0,01		TANAH			
2		.01.01	Tanah			
			Jumlah	Nihil	Nihil	
3	0,02		PERALATAN DAN MESIN			
4		.02.02	Alat Alat Besar			
5		.02.03	Alat Alat Angkutan	13	785.027.150	
6		.02.04	Alat Bengkel Dan Alat Ukur			
7		.02.05	Alat Pertanian			
8		.02.06	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	743	2.515.399.857	
9		.02.07	Alat Studio Dan Komunikasi	47	132.129.823	
10		.02.08	Alat Alat Kedokteran			
11		.02.09	Alat Laboratorium			
12		.02.10	Alat Alat Persenjataan / Keamanan			
			Jumlah	803	3.432.556.830	
13	0,03		GEDUNG DAN BANGUNAN			
14		.03.11	Bangunan Gedung			
15		.03.12	Monumen			
			Jumlah	Nihil	Nihil	
16	0,04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
17		.04.13	Jalan dan Jembatan			
18		.04.14	Bangunan Air			
19		.04.15	Instalasi			
20		.04.16	Jaringan			
			Jumlah	Nihil	Nihil	
21	0,05		ASET TETAP LAINNYA			
22		.05.17	Buku Perpustakaan			
			Barang Bercorak			
23		.05.18	Kebudayaan/Kesenian			
24		.05.19	Hewan dan Ternak Serta Tanaman			
			Jumlah	Nihil	Nihil	
25	0,06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			
26		.06.20	Konstruksi dalam Pengerjaan			
			Jumlah	Nihil	Nihil	
			TOTAL JUMLAH GOL 01 S/D 06	803	3.432.556.830,00	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa yang menjadi kewenangan Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk dicatat dalam buku inventaris hanya golongan Peralatan dan Mesin.



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dalam merumuskan isu-isu strategis/permasalahan utama, perlu dicermati kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam pelayanan SKPD.

Adapun faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Kurangnya tingkat kesadaran pentingnya penyampaian laporan administrasi pembangunan tiap-tiap Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat guna memudahkan pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain :
 - a. Sistem pelaporan yang masih belum terpusat pada satu pintu, sehingga Perangkat Daerah kesulitan memenuhi semua permintaan laporan.
 - b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki tiap-tiap Perangkat Daerah belum memadai baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.
 - c. Sarana dan Prasarana pendukung pada beberapa Perangkat Daerah masih belum memadai.
2. Kurangnya tingkat pemahaman Perangkat Daerah mengenai proses pengadaan barang/jasa dan kemudahan dalam pengadaan itu sendiri, sehingga menghambat kelancaran pengadaan barang/jasa tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain:
 - a. Kurangnya pengetahuan SDM pada tiap-tiap Perangkat Daerah tentang proses dan tahapan pengadaan barang/jasa.
 - b. Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang begitu banyak tidak diimbangi dengan jumlah personil pengadaan barang/jasa.

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya pada bidang pelaporan administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat diproyeksikan tingkat keberhasilan capaian penyelenggaraan pembinaan administrasi



pembangunan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan SKPD di atas, dapat dikemukakan isu-isu strategis pada Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :

1. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional guna mewujudkan pelayanan yang optimal.
2. Memberikan pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi guna memudahkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja.
3. Memfasilitasi koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan, baik dalam hal administrasi pembangunan maupun pelaksanaan pengadaan barang/jasa.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

1. Visi

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Visi juga berkaitan dengan keberadaan instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan, agar bekerja secara konsisten, antisipatif, inovatif serta produktif.

Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa mendukung Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang telah tertuang dalam Rancangan Program Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yaitu :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”

Visi tersebut diharapkan menjadi acuan Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang optimal. Guna mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan Misi Pembangunan yang harus dilaksanakan.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat untuk periode 2018-2023 yaitu

- a. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar,



yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
- c. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.



- e. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
- f. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Dilihat dari Visi dan Misi Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa berkaitan dengan Misi Pembangunan ke 2 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *good governance*. Hal tersebut dikarenakan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang berkualitas tidak terlepas dari pengendalian administrasi pembangunan yang optimal dan pengadaan barang/jasa yang ideal.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, **tujuan dan sasaran strategis** yang ingin dicapai pada Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa adalah :

- a. Terwujudnya pengendalian administrasi pembangunan yang efisien dan efektif.
- b. Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa yang Berkualitas.

Dari tujuan yang dikemukakan diatas, Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Darang/Jasa tahun aggaran 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.1

Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya pengendalian administrasi pembangunan yang efisien dan efektif.	Kualitas Pengendalian Administrasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Baik
2	Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa yang Berkualitas	Proses Pengadaan Memenuhi Prinsip - Prinsip Pengadaan Barang/Jasa	100%

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam perjanjian kinerja ini dijabarkan indikator keberhasilan kinerja dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun anggaran 2019 dan merupakan tolak ukur ketercapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barng/Jasa
Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pengendalian Administrasi Pembangunan yang Efisien dan Efektif.	Kualitas Pengendalian Administrasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	BAIK
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa yang Berkualitas	Proses Pengadaan Memenuhi Prinsip - Prinsip Pengadaan Barang/Jasa	100%

No.	Program	Anggaran Perubahan	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	148.340.258	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	111.680.900	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.420.000	APBD



4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100.000.000	APBD
5.	Program Peningkatan Pelaporan Aset Daerah	30.000.000	APBD
6.	Program Bina Administrasi Pembangunan	974.829.600	APBD
7.	Program Pengadaan Barang/Jasa	3.434.138.124	APBD
TOTAL		4.834.408.882	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa telah menetapkan sasaran startegis dan indikator kinerja utama pada tahun berjalan melalui Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023.

Sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa telah tertuang dalam program strategis dimana terbagi menjadi 2 (dua) program yaitu Program Bina Administrasi Pembangunan dan Program Pengadaan Barang/Jasa.

Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun anggaran 2019 melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja melalui 2 (satu) program strategis dengan 18 (delapan belas) kegiatan dan 5 (lima) program rutin/penunjang dengan 19 (sembilan belas) kegiatan didalamnya. Melalui program dan kegiatan tersebut, total pagu secara keseluruhan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 2019 berjumlah Rp. 4.834.408.882,00.

Pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2019 dilakukan terhadap capaian kinerja organisasi dengan menganalisis pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis dalam rangka mencapai sasaran startegis dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja organisasi dapat dilihat dari analisa pada tiap-tiap sasaran strategis. Adapun Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1. Sasaran Strategis Pertama,** Terwujudnya pengendalian administrasi pembangunan yang efisien dan efektif.



a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019 untuk Sasaran Strategis Pertama.

Analisa dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2019 serta dijelaskan pula penggunaan sumber daya dan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Untuk sasaran strategis yang pertama, didukung oleh 8 (delapan) kegiatan dengan capaian rincian indikator kinerja antara lain :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis Pertama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya pengendalian administrasi pembangunan yang efisien dan efektif.	Kualitas Pengendalian Administrasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Baik	Baik Sekali	100%

Penjelasan :

Dari tabel diatas perhitungan capaian berdasarkan Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan dan persentase ketepatan sasaran merupakan hasil perhitungan Indikator Program. Hasil persentase tersebut kemudian dihitung berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu untuk menemukan hasil Kualitas Pengendalian Adm. Pembangunan merupakan jumlah dari Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan (Bobot 60%) ditambah Persentase Ketepatan Sasaran (Bobot 40%) dengan Kriteria untuk menentukan capaiannya adalah jika hasil kualitas Pengendalian Adm. Pembangunan bernilai 0%-20% (Buruk); 21%-40% (Kurang Baik); 41%-60% (Cukup Baik); 61%-80% (Baik); dan 81%-100% (Baik Sekali).



Dari realisasi yang dicapai tahun 2019 adalah 82% untuk ketepatan waktu pelaporan dan 88,93% untuk ketepatan sasaran pelaporan. Setelah dikali bobot yang ditetapkan maka didapat hasil Kualitas Pengendalian Adm. Pembangunan sebesar 84,77% sesuai nilai maka Kualitasnya adalah “Baik Sekali”.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan data di atas, capaian indikator kinerja utama sudah cukup baik dengan persentase mencapai 100%, hal tersebut juga dipengaruhi dengan penggunaan sumber daya seperti yang dapat ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.2

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Pertama

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya pengendalian administrasi pembangunan yang efisien dan efektif	Program Bina Administrasi Pembangunan (8 Kegiatan)	974.829.600	942.935.426	96,73	100,00	3,27

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,73% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,27%

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian masing-masing sasaran strategis. Sasaran pertama dalam rangka mewujudkan pengendalian administrasi pembangunan yang efisien dan efektif ditunjang oleh 8 (delapan) kegiatan dengan dengan capaian kinerja kegiatan rata-rata 100%. Kegiatan-kegiatan dalam hal pengendalian administrasi pembangunan ini



sebagian besar dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian administrasi tiap-tiap SOPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

b. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya untuk Sasaran Strategis Pertama.

Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2019 bertepatan dengan periode baru RPJMD tahun 2019-2023 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang berbeda dari periode sebelumnya, untuk itu disampaikan juga IKU yang telah ditetapkan dan dicapai periode sebelumnya.

Adapun perbandingan kinerja berdasarkan capaian IKU beberapa tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2017		%	2018		%	2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Terwujudnya pengendalian administrasi pembangunan yang efisien dan efektif.	Persentase SOPD tertib laporan realisasi pembangunan	114 OPD	114 OPD	100%	114 OPD	114 OPD	100%	-	-	-
		Kualitas Pengendalian Administrasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	Baik	Baik Sekali	100%

c. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja sampai tahun 2019 dengan target RENSTRA untuk Sasaran Strategis Pertama.

Analisa dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan akhir tahun 2019 dengan target yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis Pertama Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, dan disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.3

Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis Pertama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN UTAMA	REALISASI				TARGET 2020
			2016	2017	2018	2019	
1	2	3		4	5		6
1.	Terwujudnya pengendalian administrasi pembangunan yang efisien dan efektif.	Persentase SOPD tertib laporan realisasi pembangunan (IKU RENSTRA 2013-2018)	-	100%	100%	-	-
		Kualitas Pengendalian Administrasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (IKU RENSTRA 2019-2023)	-	-	-	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2016 tidak dapat diisi dikarenakan Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa baru terbentuk pada tahun anggaran 2017 sehingga Sasaran Strategis untuk tahun sebelumnya tidak dapat dijelaskan. Sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 capaian kinerja mencapai 100% dilihat dari jumlah OPD yang tertib pelaporan. Untuk tahun 2019 yang ditetapkan melalui Renstra 2019-2023 telah ditetapkan IKU yang berbeda dari RENSTRA Periode 2013-2018 sehingga perbandingan tidak dapat dilakukan untuk indikator yang berbeda.

d. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan untuk Sasaran Strategis Pertama.

Dalam rangka mewujudkan pengendalian administrasi pembangunan yang efisien dan efektif, Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa melalui tugas



fungsi dan tata kerjanya mengkoordinir seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Provinsi Kalimantan Barat serta memfasilitasi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan Instansi Vertikal di Kalimantan Barat dalam hal pengendalian administrasi pembangunan baik untuk pelaporan maupun permasalahan. Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2019, seluruh SOPD melaporkan pelaksanaan pembangunan baik realisasi keuangan dan fisik maupun permasalahan yang dihadapi meskipun dalam hal ketepatan waktu masih jauh dari yang diharapkan.

Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan di atas, tentunya terdapat beberapa **hambatan/permasalahan** yang dihadapi. Berikut disampaikan beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- 1) SOPD Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat sering terlambat menyampaikan laporan keuangan dan fisik sehingga evaluasi secara berkala (triwulan) tidak optimal karena data kurang lengkap.
- 2) Kekosongan Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat maupun Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa menyebabkan honor panitia pelaksana kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya tidak dapat terserap.

Dari hambatan/permasalahan yang dihadapi, upaya **pemecahan/solusi** guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran diatas adalah sebagai berikut.

- 1) Mengingat kembali secara berkala melalui surat pimpinan kepada SOPD agar dapat menyampaikan laporan/data secara berkala dan tepat waktu.
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan setiap awal tahun anggaran dan membuka *contact person* yang dapat dihubungi



kapan saja agar pejabat/staf yang menangani pelaporan dapat berkonsultasi dan berkoordinasi.

- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke tiap-tiap Kabupaten/Kota untuk melihat dan memberi masukan terhadap pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan.

2. Sasaran Strategis Kedua, Terwujudnya pengadaan barang/jasa yang profesional, terbuka dan kredibel.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019 untuk Sasaran Strategis Kedua.

Analisa dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2019 serta dijelaskan pula penggunaan sumber daya dan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Untuk sasaran strategis yang kedua, didukung oleh 10 (Sepuluh) kegiatan dengan capaian rincian indikator kinerja antara lain :

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis Kedua

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4		
2.	Terwujudnya pengadaan barang/jasa yang profesional, terbuka dan kredibel.	Proses Pengadaan Memenuhi Prinsip - Prinsip Pengadaan Barang/Jasa	100% (7/7)	100% (7/7)	100%

Penjelasan :

Acuan Prinsip-Prinsip Pengadaan ada 7 (Tujuh), yaitu :

1. Efisien : Penghematan sumber daya untuk mencapai hasil pengadaan barang/jasa
2. Efektif : Pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan
3. Terbuka : Pengadaan yang diumumkan ke publik
4. Bersaing : Pengadaan untuk semua yang memenuhi persyaratan
5. Transparan : Tahapan pengadaan semua dilaksanakan melalui LPSE



6. Adil / Tidak Diskriminatif : memastikan perlakuan yang sama
7. Akuntabel : Adanya pencatatan lengkap mengenai pengadaan barang/jasa

Pengukuran untuk melihat capaian terhadap Prinsip-Prinsip Pengadaan tersebut sesuai dengan urutannya yaitu :

1. Nilai Kontrak dibagi HPS/PAGU dari OPD tidak sama dengan nol (0); dengan realisasi Nilai Kontrak sebesar Rp.650.349.305.295,91 dengan Pagu Total Rp.650.349.305.295,91 maka ada efisiensi sekitar Rp.39.175.103.075,37
2. Jumlah Tender yang disetujui OPD dibagi Jumlah Tender yang dilaksanakan oleh Pokja dikali 100%; dengan realisasi dari usulan paket seluruhnya berjumlah 391 Paket, semuanya selesai ditenderkan (100% dari usulan) dengan hasil 342 Paket ditetapkan pemenang dan 49 paket dibatalkan/tidak ditemukan pemenang.
3. Jumlah Tender yang diumumkan ke Publik dibagi Jumlah Tender yang diusulkan ke Biro APPBJ dikali 100%; dengan realisasi dari 391 Paket yang diusulkan seluruhnya telah diumumkan kepada publik melalui Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
4. Jumlah Tender yang ditetapkan pemenang dibagi Jumlah Tender yang diusulkan ke Biro APPBJ dikali 100%; dengan realisasi dari usulan paket seluruhnya berjumlah 391 Paket, semuanya selesai ditenderkan dengan hasil 342 Paket ditetapkan pemenang dan 49 paket dibatalkan/tidak ditemukan pemenang yang artinya 85,67% telah ditetapkan pemenang.
5. Jumlah Tender yang dilaksanakan melalui LPSE dibagi Jumlah Tender yang diusulkan ke Biro APPBJ dikali 100%; dengan realisasi dari usulan paket seluruhnya berjumlah 391 Paket, semuanya dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
6. Jumlah Tender yang direview dibagi Jumlah Tender yang diusulkan ke Biro APPBJ dikali 100%; dengan realisasi dari usulan paket seluruhnya berjumlah 391 Paket, semuanya dilaksanakan review oleh Pokja Pemilihan sebelum ditenderkan.
7. Jumlah Tender yang memiliki dokumen berita acara dibagi Jumlah Tender yang diusulkan ke Biro APPBJ dikali 100%; dengan realisasi dari usulan paket seluruhnya berjumlah 391 Paket, semuanya dilaksanakan dan telah dibuat Dokumen Berita Acara baik tender yang berhasil maupun yang gagal.

Berdasarkan realisasi tersebut diatas dengan hasil perhitungan yang diatas 85% - 100% maka dapat disimpulkan bahwa Proses Pengadaan yang dilakukan telah memenuhi Prinsip - Prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan data di atas, capaian indikator kinerja utama sudah cukup baik dengan persentase mencapai 100%, hal tersebut juga dipengaruhi dengan penggunaan sumber daya seperti yang dapat ditampilkan pada tabel berikut.



Tabel 3.5

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Kedua

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya pengadaan barang/jasa yang profesional, terbuka dan kredibel.	Program Pengadaan Barang/Jasa (10 Kegiatan)	3.434.138.124	3.290.283.377	95,81	100,00	4,19

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,81% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,19%

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian masing-masing sasaran strategis. Sasaran kedua dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa yang profesional, terbuka dan kredibel ditunjang oleh 10 (sepuluh) kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan rata-rata 100%. Kegiatan-kegiatan dalam hal pengadaan barang/jasa ini sebagian besar dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pemilihan penyedia barang/jasa untuk seluruh paket yang akan dilelangkan pada tiap-tiap SOPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

b. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya untuk Sasaran Strategis Kedua.

Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2019 bertepatan dengan periode baru RPJMD tahun 2019-2023 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang berbeda



dari periode sebelumnya, untuk itu disampaikan juga IKU yang telah ditetapkan dan dicapai periode sebelumnya.

Adapun perbandingan kinerja berdasarkan capaian IKU beberapa tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2017		%	2018		%	2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Terwujudnya pengadaan barang/jasa yang profesional, terbuka dan kredibel.	Persentase pelaksanaan pemilihan penyedia terhadap usulan paket pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	425 Paket	431 Paket	101%	357 Paket	241 Paket (116 paket dibatalkan OPD)	100%	-	-	-
		Proses Pengadaan Memenuhi Prinsip - Prinsip Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	-	-	100% (7/7)	100% (7/7)	100%

c. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja sampai tahun 2019 dengan target RENSTRA untuk Sasaran Strategis Kedua.

Analisa dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan akhir tahun 2019 dengan target yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis Kedua Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, dan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis Kedua

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI				TARGET 2020
			2016	2017	2018	2019	
1	2	3		4	5		6
1.	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Terselesainya paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh	-	431 Paket	241 Paket (116 paket)	-	-



		Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa			dibatalkan OPD)		
		Proses Pengadaan Memenuhi Prinsip - Prinsip Pengadaan Barang/Jasa	-			100%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat juga bahwa untuk tahun 2015 tidak dapat diisi dikarenakan Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa baru terbentuk pada tahun anggaran 2017 sehingga program/kegiatan untuk tahun sebelumnya tidak dapat dijelaskan untuk sasaran strategis kedua ini.

Dijelaskan pula bahwa untuk tahun 2018 terjadi rasionalisasi anggaran yang menyebabkan 116 paket dibatalkan oleh OPD sehingga yang dilaksanakan pemilihan penyedia hanya 241 paket. Untuk tahun 2019 yang ditetapkan melalui Renstra 2019-2023 telah ditetapkan IKU yang berbeda dari RENSTRA Periode 2013-2018 sehingga perbandingan tidak dapat dilakukan untuk indikator yang berbeda.

d. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan untuk Sasaran Strategis Kedua.

Dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang profesional, terbuka dan kredibel, dapat dilaporkan bahwa Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2019 menerima usulan paket yang akan dilelang sebanyak 391 paket (APBD dan APBN), dengan rincian hasil lelang sebagai berikut.

- 1) Dari total usulan 391 paket pengadaan barang/jasa yang masuk (APBD dan APBN), disampaikan rincian sebagai berikut :



- a. 342 Paket telah ditetapkan pemenang dan perikatan kontrak.
 - b. 49 Paket dibatalkan atau tidak diperoleh pemenang.
- 2) Untuk pengadaan barang/jasa yang bersumber dari **APBD** dapat dilaporkan sebagai berikut:
- a. Jumlah Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diumumkan PA/KPA pada aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) yang berpotensi akan dilaksanakan secara e-Tendering berjumlah **473 (empat ratus tujuh puluh tiga)** paket dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 888.404.456.387,00** (delapan ratus delapan puluh delapan milyar empat ratus empat juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 34,26% dari total belanja langsung APBD.
 - b. Terhadap RUP yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, selanjutnya rekapitulasi permohonan pemilihan penyedia barang/jasa dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disampaikan melalui aplikasi SIPRAJA pada alamat portal <http://sipraja.abangpraja.id> sebanyak **343 (tiga ratus empat puluh tiga)** paket dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 775.204.155.053,00** (tujuh ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus empat juta seratus lima puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah) dengan perkembangan sebagai berikut :
 - 1) Usulan belum ditindaklanjuti: **0** paket;
 - 2) Review Dokumen antara Pokja dan PPK: **0** paket;
 - 3) Tender/Seleksi sedang berjalan: **0** paket;
 - 4) Pemilihan Penyedia Selesai: **296** paket;
 - 5) Pemilihan Penyedia dibatalkan: **47** paket;
 - c. Sebaran kategori pengadaan dari 343 paket terdiri dari:



- 1) 40,82% (140 paket) Pekerjaan Konstruksi;
 - 2) 35,86% (123 paket) Jasa Konsultansi;
 - 3) 18,08% (62 paket) Pengadaan Barang;
 - 4) 5,25% (18 paket) Jasa Lainnya;
- d. Total efisiensi atau sisa anggaran yang didapat dari hasil pemilihan penyedia secara e-Tendering adalah sebesar **Rp. 52.483.516.576,90** (lima puluh dua milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang merupakan selisih antara nilai Penetapan Pemenang sebesar **Rp. 611.229.574.476,10** (enam ratus sebelas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dan nilai Pagu sebesar **Rp. 648.267.641.934,12** (enam ratus empat puluh delapan milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- 3) Untuk pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN dapat dilaporkan sebagai berikut:
- a. Jumlah Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diumumkan PA/KPA pada aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) yang berpotensi akan dilaksanakan secara e-Tendering berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 55.127.115.000,00 (lima puluh lima milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah).
 - b. Terhadap RUP yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, selanjutnya rekapitulasi permohonan pemilihan penyedia barang/jasa dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disampaikan melalui aplikasi SIPRAJA pada alamat portal



<http://sipraja.abangpraja.id> sebanyak 48 (empat puluh delapan) paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 79.907.884.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan perkembangan sebagai berikut:

- 1) Usulan belum ditindaklanjuti: 0 paket;
 - 2) Review Dokumen antara Pokja dan PPK: 0 paket;
 - 3) Tender/Seleksi sedang berjalan: 0 paket;
 - 4) Pemilihan Penyedia Selesai: 46 paket;
 - 5) Pemilihan Penyedia dibatalkan: 2 paket;
- c. Sebaran kategori pengadaan dari 48 paket terdiri dari:
- 1) 60,42% (29 paket) Pengadaan Barang;
 - 2) 22,92% (11 paket) Pekerjaan Konstruksi;
 - 3) 14,58% (7 paket) Jasa Lainnya;
 - 4) 2,08% (1 paket) Jasa Konsultansi;
- d. Total efisiensi atau sisa anggaran yang didapat dari hasil pemilihan penyedia secara e-Tendering adalah sebesar Rp. 3.588.153.180,19 (tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) yang merupakan selisih antara nilai Penetapan Pemenang sebesar Rp. 39.119.730.819,81 (tiga puluh sembilan milyar seratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan nilai Pagu sebesar Rp. 41.256.766.437,16 (empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan di atas, tentunya terdapat beberapa **hambatan/permasalahan** yang dihadapi.



Berikut disampaikan beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- 1) Beberapa kali terjadi tender ulang dan tender gagal, hal tersebut terjadi disebabkan terkonsentrasinya banyak paket pada bulan-bulan tertentu sehingga berpengaruh pada tingkat kemampuan para pelaku usaha dalam menyiapkan penawaran serta keterlambatan mengusulkan paket ke ULP untuk ditenderkan. Selain itu dengan terjadinya perubahan regulasi Pengadaan Barang/Jasa sejak Tahun 2018, maka dipandang perlu melaksanakan bimtek secara rutin untuk meningkatkan kapasitas pelaku pengadaan (PPK, Pokja Pemilihan, Pelaku Usaha).
- 2) Konsistensi Data pada Sistem Informasi Pengadaan perlu ditingkatkan lagi agar semakin sedikit waktu untuk mengolah data secara manual sehingga penyampaian laporan kepada pimpinan bisa lebih cepat dan akurat
- 3) Ketidaktertiban Perangkat Daerah dalam mengumumkan RUP; Ketidaktepatan pengisian RUP seperti keliru dalam menentukan cara pengadaan, nilai pagu anggaran, metode pemilihan, bulan pemilihan, bulan pekerjaan dan bulan pemanfaatan barang/jasa.
- 4) Fasilitas ruang pelayanan yang masih terbatas dan tenaga PNS yang dapat ditugaskan belum tersedia.

Dari hambatan/permasalahan yang dihadapi, upaya **pemecahan/solusi** guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran diatas adalah sebagai berikut.

- 1) Akan melakukan Pemetaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun yang akan datang sehingga Pengadaan Barang/Jasa dapat berjalan sesuai jadwal.
- 2) Mengembangkan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang ada sebagai alat bantu dalam pengajuan usulan



pemilihan penyedia barang/jasa sehingga alur proses maupun dokumen dapat menjadi lebih baik dan sesuai aturan yang berlaku.

- 3) Sosialisasi RUP baik secara global maupun secara personal sehingga pengisian RUP yang optimal dapat tercapai.
- 4) Menginventarisasi kebutuhan baik dalam hal perangkat maupun ruangan sehingga dapat mengusulkan penambahan perangkat dan perbaikan ruangan pelayanan/kerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa capaian sasaran kinerja Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2019 sudah tercapai. Pada akhir tahun 2019, Alokasi dana untuk pembiayaan seluruh kegiatan yang dianggarkan sebesar Rp. 4.834.408.882,00 dari APBD (DPPA) dengan realisasi sebesar Rp. 4.621.445.104,00 atau 95,59%. Adapun rincian realisasi program/kegiatan tersebut dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Tahun 2019 Dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2019		
		PAGU	REALISASI	%
4	5		16	17
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	148.340.258	125.626.044	84,69%
1	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	-	-	
2	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	6.000.000	4.775.800	79,60%
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.500.000	7.500.000	100,00%
4	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000	19.850.000	99,25%
5	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	114.840.258	93.500.244	81,42%
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	111.680.900	111.496.900	99,84%
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	48.080.900	47.906.900	99,64%
2	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	7.600.000	7.600.000	100,00%



3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	8.000.000	7.990.000	99,88%
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi	48.000.000	48.000.000	100,00%
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	35.420.000	33.830.857	95,51%
1	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	20.420.000	19.830.857	97,11%
2	Penyusunan Penetapan Kinerja	15.000.000	14.000.000	93,33%
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100.000.000	89.672.500	89,67%
1	Penyusunan laporan keuangan	25.000.000	23.400.000	93,60%
2	Penyusunan LAKIP	15.000.000	13.232.500	88,22%
3	Penyusunan RENSTRA	15.000.000	12.765.000	85,10%
4	Penyusunan RENJA SKPD	15.000.000	12.765.000	85,10%
5	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	15.000.000	13.510.000	90,07%
6	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	15.000.000	14.000.000	93,33%
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	30.000.000	27.600.000	92,00%
1	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	15.000.000	13.800.000	92,00%
2	Penyusunan RKBU dan RKPBU	15.000.000	13.800.000	92,00%
VI	PROGRAM BINA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	974.829.600	942.935.426	96,73%
1	Databased Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	114.378.000	111.318.000	97,32%
2	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	163.514.400	158.818.528	97,13%
3	Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik dan Prasarana	112.522.700	112.516.900	99,99%
4	Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi	114.213.000	110.231.400	96,51%
5	Pengendalian Administrasi Pembangunan Pemerintahan	120.135.700	117.335.700	97,67%
6	Pengendalian Administrasi Pembangunan Sosial Budaya	117.050.000	114.410.398	97,74%
7	Perumusan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pembangunan	107.646.800	101.116.800	93,93%
8	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Perekonomian dan Pembangunan	125.369.000	117.187.700	93,47%
VII	PROGRAM PENGADAAN BARANG/JASA	3.434.138.124	3.290.283.377	95,81%
1	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	2.175.778.404	2.170.336.717	99,75%
2	Penyusunan Laporan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	59.390.000	42.749.800	71,98%
3	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	474.224.440	441.399.866	93,08%
4	Pengembangan Layanan Pengadaan	105.564.400	100.444.400	95,15%
5	Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	57.776.320	52.626.320	91,09%
6	Pendampingan Hukum Bagi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa	46.364.400	41.214.400	88,89%



7	Pemaketan Barang/Jasa pada Rencana Umum Pengadaan	134.882.000	98.823.600	73,27%
8	Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Teknis Pengadaan Barang/Jasa	166.487.360	161.328.274	96,90%
9	Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	113.066.400	90.914.400	80,41%
10	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100.604.400	90.445.600	89,90%
	TOTAL	4.834.408.882	4.621.445.104	95,59%

Dari rincian anggaran di atas, hampir seluruh kegiatan terlaksana dengan sesuai harapan dengan realisasi anggaran rata-rata 95,59%. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis pertama, didukung dengan pagu anggaran total sebesar Rp. 974.829.600,- melalui 8 (delapan) kegiatan dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 942.935.426,- atau sekitar 96,73%

Adapun dalam rangka mewujudkan sasaran strategis kedua, didukung dengan pagu anggaran total sebesar Rp. 3.434.138.124,- melalui 10 (sepuluh) kegiatan dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.290.283.377,- atau sekitar 95,81%.

--o0o--



BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa secara keseluruhan dapat disimpulkan berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari pengukuran kinerja yang dilakukan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan berhasil dicapai dalam waktu yang ditetapkan. Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari kondisi lingkungan kerja yang cukup kondusif yang terjalin baik secara horizontal maupun vertikal dalam kesatuan organisasi serta dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai meskipun kondisinya belum dapat dikategorikan baik.

Secara umum, pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa berjalan dengan lancar dan baik dengan penyerapan anggaran sekitar 95,59%.

Disampaikan juga bahwa sesuai dengan rencana kinerja tahun 2019, Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang harus tercapai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran didukung oleh beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat dari capaian realisasi kinerja yang telah memenuhi target yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian sasaran diatas, adanya hambatan/kendala tidak dapat dihindari sehingga seluruh komponen organisasi bekerja dengan maksimal baik dalam hal antisipasi maupun pemecahan solusi guna pencapaian kinerja yang optimal baik pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini disusun sebagai laporan dan menjadi bahan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, Januari 2020

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DAN PENGADAAN BARANG/JASA,

Drs. RAMINUDDIN, M.Si

Pembina

NIP. 19770830 199603 1 001



Lampiran :

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO.	KEGIATAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya pengendalian administrasi pembangunan yang efisien dan efektif.	Kualitas Pengendalian Administrasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Baik	Baik Sekali	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa yang Berkualitas	Proses Pengadaan Memenuhi Prinsip - Prinsip Pengadaan Barang/Jasa	100% (7/7)	100% (7/7)	100%

Perhitungan Indikator pertama :

Dari tabel diatas perhitungan capaian berdasarkan Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan dan persentase ketepatan sasaran merupakan hasil perhitungan Indikator Program. Hasil persentase tersebut kemudian dihitung berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu untuk menemukan hasil Kualitas Pengendalian Adm. Pembangunan merupakan jumlah dari Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan (Bobot 60%) ditambah Persentase Ketepatan Sasaran (Bobot 40%) dengan Kriteria untuk menentukan capaiannya adalah jika hasil kualitas Pengendalian Adm. Pembangunan bernilai 0%-20% (Buruk); 21%-40% (Kurang Baik); 41%-60% (Cukup Baik); 61%-80% (Baik); dan 81%-100% (Baik Sekali).

Dari realisasi yang dicapai tahun 2019 adalah 82% untuk ketepatan waktu pelaporan dan 88,93% untuk ketepatan sasaran pelaporan. Setelah dikali bobot yang ditetapkan maka didapat hasil Kualitas Pengendalian Adm. Pembangunan sebesar 84,77% sesuai nilai maka Kualitasnya adalah "Baik Sekali".

Perhitungan Indikator Kedua :

Acuan Prinsip-Prinsip Pengadaan ada 7 (Tujuh), yaitu :

- 1) Efisien : Penghematan sumber daya untuk mencapai hasil pengadaan barang/jasa
- 2) Efektif : Pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan
- 3) Terbuka : Pengadaan yang diumumkan ke publik
- 4) Bersaing : Pengadaan untuk semua yang memenuhi persyaratan
- 5) Transparan : Tahapan pengadaan semua dilaksanakan melalui LPSE
- 6) Adil / Tidak Diskriminatif : memastikan perlakuan yang sama
- 7) Akuntabel : Adanya pencatatan lengkap mengenai pengadaan barang/jasa



Pengukuran untuk melihat capaian terhadap Prinsip-Prinsip Pengadaan tersebut sesuai dengan urutannya yaitu :

1. Nilai Kontrak dibagi HPS/PAGU dari OPD tidak sama dengan nol (0); dengan realisasi Nilai Kontrak sebesar Rp.650.349.305.295,91 dengan Pagu Total Rp.650.349.305.295,91 maka ada efisiensi sekitar Rp.39.175.103.075,37
2. Jumlah Tender yang disetujui OPD dibagi Jumlah Tender yang dilaksanakan oleh Pokja dikali 100%; dengan realisasi dari usulan paket seluruhnya berjumlah 391 Paket, semuanya selesai ditenderkan (100% dari usulan) dengan hasil 342 Paket ditetapkan pemenang dan 49 paket dibatalkan/tidak ditemukan pemenang.
3. Jumlah Tender yang diumumkan ke Publik dibagi Jumlah Tender yang diusulkan ke Biro APPBJ dikali 100%; dengan realisasi dari 391 Paket yang diusulkan seluruhnya telah diumumkan kepada publik melalui Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
4. Jumlah Tender yang ditetapkan pemenang dibagi Jumlah Tender yang diusulkan ke Biro APPBJ dikali 100%; dengan realisasi dari usulan paket seluruhnya berjumlah 391 Paket, semuanya selesai ditenderkan dengan hasil 342 Paket ditetapkan pemenang dan 49 paket dibatalkan/tidak ditemukan pemenang yang artinya 85,67% telah ditetapkan pemenang.
5. Jumlah Tender yang dilaksanakan melalui LPSE dibagi Jumlah Tender yang diusulkan ke Biro APPBJ dikali 100%; dengan realisasi dari usulan paket seluruhnya berjumlah 391 Paket, semuanya dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
6. Jumlah Tender yang direview dibagi Jumlah Tender yang diusulkan ke Biro APPBJ dikali 100%; dengan realisasi dari usulan paket seluruhnya berjumlah 391 Paket, semuanya dilaksanakan review oleh Pokja Pemilihan sebelum ditenderkan.
7. Jumlah Tender yang memiliki dokumen berita acara dibagi Jumlah Tender yang diusulkan ke Biro APPBJ dikali 100%; dengan realisasi dari usulan paket seluruhnya berjumlah 391 Paket, semuanya dilaksanakan dan telah dibuat Dokumen Berita Acara baik tender yang berhasil maupun yang gagal.

Berdasarkan realisasi tersebut diatas dengan hasil perhitungan yang diatas 85% - 100% maka dapat disimpulkan bahwa Proses Pengadaan yang dilakukan telah memenuhi Prinsip - Prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 : Rp. 4.834.408.882,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 : Rp. 4.621.445.104,00

Pontianak, 2020
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DAN PENGADAAN BARANG/JASA,

Drs. RAMINUDDIN, M.Si
Pembina
NIP. 19770830 199603 1 001